



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 139-149

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Politik Hukum Di Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima  
Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu  
(Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011)

Ihsan Hamdi Armaoyuda<sup>1</sup>, Ismaidar<sup>2✉</sup>

Panca Budi Medan

Email: [ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>2✉</sup>

Abstrak

Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik pada saat membentuk suatu pemerintahan maupun pada saat suatu partai politik berperan sebagai oposisi dalam pemerintahan. Misalnya Partai Persatuan Pembangunan yang didirikan hasil peleburan empat partai Islam, termasuk Masyumi, pada tanggal 5 Januari 1971, sejak saat itu hingga kini Partai Persatuan Pembangunan tetap eksis dalam perpolitikan nasional sebagai rumah besar Partai Persatuan Pembangunan. Umat Islam dalam politik berlambang Ka'bah menjaga dan mengkritisi kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu. Hal inilah yang menjadi alasan penulis memilihnya sebagai judul penelitian untuk mengetahui seperti apa PPP Labuhanbatu dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik Islam berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011, metode penelitian adalah metode kualitatif dimana data diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, data yang terdapat di lapangan sebagai bahan pengisian skripsi ini, yang tempatnya, penelitian ini berada di wilayah timur Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja partai politik umat Islam yang dalam penelitian ini fokus pada PPP Labuhanbatu. Penulis mengumpulkan data tertulis dan wawancara kepada fungsionaris DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu, anggota legislatif PPP periode 2014-2019, serta tokoh masyarakat Labuhanbatu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.

Kata Kunci: *Politik, Politik Islam*

## Abstract

Political parties are formed to exercise political power either when forming a government or when a political party acts as an opposition in the government. For example, the United Development Party which was founded as a result of the fusion of four Islamic parties, including the Masyumi, on January 5 1971, from that day until now the United Development Party continues to exist in national politics as the mansion of the Islamic ummah in politics with the symbol of the Kaaba guarding and criticize government policies from time to time. This is the reason the author chose it as the title of the research to find out what PPP Labuhanbatu is like in carrying out its function as an Islamic political party based on Law no. 2 of 2011, the research method is a qualitative method where data is obtained based on observations, interviews, data contained in the field as material for filling this thesis, which is the place, this research is in the east of North Sumatra, precisely in Labuhanbatu Regency. This research aims to find out the performance of the Islamic Ummah political party, which in this research focuses on PPP Labuhanbatu. The author collected written data and interviews from Labuhanbatu Regency PPP DPC functionaries, PPP legislative members for the 2014-2019 period, as well as from Labuhanbatu community figures from various sub-districts in Labuhanbatu Regency.

Keywords: *Political, Islamic Politics*

## PENDAHULUAN

Secara harfiah, partai adalah kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partai adalah perkumpulan segolongan orang yang seasas, sehaluan, dan setujuan. Masih dalam kamus yang sama, partai politik didefinisikan sebagai perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi tertentu. Politik secara istilah menurut Syekh Taqiyudin An-Nabhani, ulama alumnus Al-Azhar, Mesir, melihat pengertian politik dari kata Siyasa. Menurut An-Nabhani, pengertian pokok politik meliputi konsep penguas(hukum, sulthon) pengaturan urusan rakyat (riayah) penerapan aturan, baik di dalam dan luar negeri (tatbiq ahkam), serta koreksi dan kontrol rakyat (Riyan dan Suryani, 2008). Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Tatriyansyah, 2023). Charles S. Mack mendefinisikan partai politik dalam demokrasi sebagai lembaga otonom, koalisi warga negara yang melembaga yang dioperasikan dibawah kendali bersama untuk mencalonkan kandidat sebagai pejabat publik, berkompetisi dengan partai lain dalam pemilihan, dengan tujuan untuk memperoleh penguasaan dan pengaturan atas pemerintahan (*political party in a democracy is an autonomous, institutionalized coalition of citizens that operates under a common label to*

*nominate candidates for public office, competing with other parties to elect them, for the purpose of gaining control and organization of the government).*

Otonom di sini berarti bahwa organisasi partai terpisah dari organisasi partai lain dan dari pemerintah, meskipun operasionalisasinya diatur. Melembaga berarti bahwa partai dioperasikan dibawah aturan main dan praktik, formal ataupun informal, yang memungkinkan pelaku politik untuk membangun harapan untuk masa depan dan memfasilitasi akuntabilitas kepada para pemilih. Dari pengertian partai politik menurut beberapa ahli dapat penulis simpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang terbentuk atas tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Sehingga munculnya partai politik ini bukan suatu hal yang dipaksakan, sebab dengan adanya partai politik berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik adalah alat untuk individu memperoleh dukungan dalam menduduki jabatan pemerintah.

Politik dalam bahasa Arab artinya siyasah yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah (Armaoyuda, 2019). Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) (Poerwadarminta, 1991). Visi, misi dan sifat pendirian partai Islam. Visi partai Islam wajib berdasarkan kepada aqidah Islam, ia juga harus siap memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat (Fakhri, 2000). Menghidupkan kembali nilai-nilai murni ajaran Islam. Dan misi parti Islam adalah meletakkan agenda pembinaan masyarakat Islam secara menyeluruh dalam sisi kehidupan mulai dari pembinaan moral, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik sesuai dengan kekuatan partai untuk bergerak dalam setiap bidang tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu pendukung-pendukung setia yang mau bekerja sama.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik yang terdiri dari berbagai ragam komponen organisasi keislaman. Di dalamnya terdapat empat partai peserta pemilu 1971 yang tergabung sebagai respon kebijakan politik pemerintah orde baru untuk menyederhanakan sistem perpolitikan nasional. Keempat partai tersebut adalah partai Nahdlatul Ulama (Partai NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia (PERTI) (Armaoyuda, 2019). PPP dideklarasikan pada tanggal 5 januari 1973 oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat partai islam peserta pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok Persatuan Pembangunan atau gabungan fraksi-fraksi dari empat partai islam di

DPR, para deklaratator itu adalah KH. Idham Chalid sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdltul Ulama, H.M. Syafaat Mintaredja, SH sebagai ketua umum Parmusi, H. Anwar Tjokroaminoto sebagai ketua umum PSII, H. Rusli Halil sebagai ketua umum PERTI dan H. Masjkur sebagai ketua kelompok fraksi Persatuan Pembangunan di DPR RI (Armaoyuda, 2019).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif empiris, penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum norrmatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarvakat. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama, menelaah yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya adalah asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung (Ibrahim, 2008).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang terkait mengenai fungsi partai politik, pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang merujuk pada kaidah-kaidah (Marzuki, 2017). Tehnik Pengumpulan data data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang di teliti yaitu penelitian ini menjelaskan berdasarkan data Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai Politik

Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi: (Chandra, 2020) Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara

Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan UU tersebutlah setiap partai politik melaksanakan fungsinya di tengah masyarakat, begitu juga dengan PPP termasuk partai tertua di Indonesia. PPP merupakan memiliki ideologi Islam yang mana berbeda dengan partai-partai lain yang bersifat Nasionalis, disini penulis ingin memaparkan hasil penelitian atas skrpsi yang berjudul Fungsi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Undang-Undang No.2 Tahun 2011) yang penulis dapatkan dari struktural pengurus PPP dan juga pernyataan dari tokoh masyarakat atas kinerja yang dilakukan PPP dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik berdasarkan UU No.2 Tahun 2011.

#### 1. PPP sebagai wadah Pendidikan Politik bagi anggota Masyarakat

Partai politik berfungsi sosialisasi politik menurut Dennis Kavanagh dalam political culture menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik kedalam suatu masyarakat (Haryanto et al., 2015). Inti dari sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan politik kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai politik, agar masyarakat memahami politik dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam partai politik dan ikut berpartisipasi pada pemilu. Dalam proses ini partai politik dapat dikatakan telah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik. Sosialisasi pada masyarakat adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memberikan kesadaran politik pada masyarakat. Partai PPP yang berazaskan Islam, maka seharusnya partai yang berlambang ka'bah tersebut haruslah berlandaskan Islam disetiap program kerja yang sesuai nilai- nilai Islam dan keputusannya, akan tetapi faktanya di lapangan partai PPP ini tidak ada program kerja yang mengkhususkan atau memantaskan diri sebagai partai Islam sesuai ajaran dan azas azas Islam. Khususnya di bidang pendidikan politik untuk masyarakat muslim di Labuhanbatu.

## 2. PPP sebagai penciptaan iklim kondusif bagi persatuan bangsa.

Partai Persatuan Pembangunan memiliki cara tersendiri dalam menciptakan iklim kondusif bagi persatuan bangsa yakni dengan cara tanpa memaksakan kehendak pimpinan itu sendiri, dan membuka kesempatan bagi para anggota-anggota partai untuk menentukan pilihannya sendiri dalam memutuskan pilihan jikalau pilihan itu bersifat eksternal. Contohnya pada Pemilihan Bupati, Gubernur serta Pemilihan Presiden. Dan untuk keputusan internal partai dalam menentukan program kerja, PPP memusyawarahkan dan setiap keputusan yang diambil pimpinan wajib untuk diikuti dan dilaksanakan. Contohnya yaitu dalam memutuskan program kerja (Haryanto et al., 2015).

Penciptaan kondusif yang dilakukan PPP dalam penelitian penulis di lapangan bisa dikatakan cukup baik dikarenakan tidak memaksakan kehendak dari keputusan yang mempunyai wewenang dalam memutuskan ditubuh partai kepada para kader dan juga masyarakat, PPP menilai bahwa masalah pilihan politik sering menjadi konflik di internal partai maupun masyarakat. PPP menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia setiap pesta demokrasi.

## 3. PPP sebagai wadah penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi masyarakat.

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpang siuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest aggregation) agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (interest articulation). Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat. Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan fungsi menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui para kader-kader yang sekarang duduk di DPRD Labuhanbatu. PPP berhasil mengantarkan kader nya duduk di DPRD Labuhanbatu sebanyak 5 kader yang mana dari lima daerah pemilihan di Labuhanbatu berhasil setiap daerah pemilihan mendudukkan satu orang kader, yang sebagai Pimpinan Fraksi PPP di DPRD yaitu Muniruddin, S.Ag selaku Ketua DPC PPP Labuhanbatu.

## 4. PPP sebagai wadah partisipasi politik masyarakat.

Sebagai partai Islam seharusnya PPP menciptakan masyarakat Islam dengan sifat-sifat yang asli agar dapat melaksanakan tugasnya untuk berpartisipasi dalam memunculkan generasi muslim yang akan menjadi landasan bagi tegaknya agama Islam. Keempat, mengembalikan kejayaan Islam menuju tegaknya syariat Allah di muka bumi. Menurut Hasan al Banna, membentuk keluarga yang Islami yaitu membentuk pasangan rumah

tangga yang berdasarkan dasar agama yang kuat. Sebuah keluarga yang berlandaskan ajaran Islam dengan sempurna akan mampu menyiapkan generasi yang baik dan sekaligus merubah kerusakan masyarakat yang sedang berlaku dan menggantikannya dengan generasi yang lebih baik.

#### 5. PPP sebagai wadah rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik

Dalam ilmu politik, rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti politik seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Faktor Pendukung bagi Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik

Partai politik Islam. tujuannya adalah, untuk menegakkan kedaulatan Tuhan dimuka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup didunia ini. Tokoh-tokoh partai akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertawa. Yaitu orang-orang yang ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimah Allah dan mencari keridhaan-Nya. Orang-orang yang bemiati, mengeksploitasi Islam untuk mencari kekuasaan keduniaan yang bersifat sementara, tidak diterima menjadi pengurus (Mahendra, 1999).

Faktor-faktor pendukung yang dirasakan PPP labuhanbatu saat ini yakni :

##### a. Ketokohan partai

Peran kepemimpinan dalam proses pemilihan umum memiliki kecenderungan yang sangat positif, dari penelitian yang penulis dapati berdasarkan hasil pemilu yang sudah dihadapi PPP di Labuhanbatu, baik legislatif maupun eksekutif dari mulai 2004 sampai 2014. PPP berhasil menempati posisi 5 besar perolehan suara terbanyak, serta pada tahun 2015 berhasil mengusung Dr. Tigor Panusunan Siregar sebagai bupati Labuhanbatu.

##### b. Hubungan emosional

Hubungan emosional yang dimaksud dalam konteks ini adalah kedekatan dalam hal agama, organisasi, idiologi, suku, dalam hal ini orientasi religius banyak menjadi faktor utama. Mayoritas pemilih di Labuhanbatu sering melihat darimana asal kandidat ataupun pimpinan partai berasal. Masyarakat pemilih Labuhanbatu cenderung memilih dari kedekatan agama, organisasi, idiologi, maupun suku yang sama. Yang mana kedekatan ini

juga yang menjadi acuan bagi partai-partai lain semisal PKB dengan organisasi NU nya, PAN dengan organisasi Muhammadiyah nya, PPP, PKS, PBB dengan ideologi agamanya. Atas dasar konsep tersebut, maka terdapat hubungan antara pemilih dengan tokoh partai yang berperan pada pimpinan partai politik. Hubungan ini akan mempengaruhi sikap seseorang dalam memilih partai politik. Hubungan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator-indikator agama, organisasi, ideologi dan juga suku.

c. Platform

Platform merupakan program kerja yang hendak dicapai yang disusun berdasarkan isu-isu politik yang paling mendasar dan diperlukan bagi masyarakat pemilih. Isu-isu tersebut biasanya lebih dekat pada aspek sosial seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Kemampuan tokoh-tokoh politik dan partainya mengangkat isu ini sangat dibutuhkan masyarakat pemilih. Atas dasar konsep tersebut, maka partai yang mampu menawarkan program yang menawarkan solusi permasalahan bangsa akan membentuk sikap seseorang terhadap partai tersebut sehingga dampaknya akan mempengaruhi dalam keputusan memilih partai tersebut.

d. Citra (image)

Citra partai politik atau Political Image didefinisikan oleh Firmanzah sebagai representasi dan persepsi masyarakat akan suatu partai politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik (Abdul Mu'id, 2017). Citra partai politik sangat penting dalam pemilihan umum yang akan menjadi pembeda dengan partai politik lain dimata masyarakat. Atas dasar konsep ini dapat disimpulkan bahwa citra partai menjadi sebuah identitas partai, citra partai dapat diukur dengan indikator, Pertama : Identitas partai yang akan menjadi pembeda dengan partai lain, Kedua : Memberikan kesan yang positif dibenak masyarakat, Ketiga : Mencerminkan tingkat kepercayaan, Keempat : Mencerminkan kompetensi partai.

e. Ideology

Keterkaitan ideologi suatu partai terhadap ideologi pemilih akan mempengaruhi sikap seseorang pemilih. Tentunya kemudian akan mempengaruhi dalam keputusan memilih partai politik. Untuk mengukur sebuah ideologi yang dipegang teguh oleh seseorang dapat diukur dari sistem nilai, keyakinan, jargon maupun simbol. Akan mempengaruhi keputusannya dalam menentukan pilihan terhadap partai politik. PPP yang mengklaim rumah besar umat Islam yang mengedepankan musyawarah dan etika politik dalam penyelesaian konflik. Sehingga masyarakat menginginkan PPP untuk menjadi partai besar secara nasional, dan untuk daerah kabupaten Labuhanbatu suara PPP setiap diselenggarakan pemilu berhasil menduduki peringkat 4 besar suara terbanyak untuk Pileg,

dan berhasil mengantarkan calon yang diusung PPP yakni DR. Tigor Panusunan Siregar S.Ppd. menjadi Bupati Labuhanbatu pada periode 2010- 2015 yang lalu. Ini semua karena tingginya ke eksistensian partai belambangkan ka'bah ini.

Faktor Penghambat Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik

1. Minim nya kader-kader PPP di kursi DPRD sehingga aspirasi yang diserap dan diusulkan selalu kandas karena selalu kalah dalam voting suara.
2. SDM di labuhanbatu masih berkutik dengan budaya lama yakni dengan cara kalau tak kasi uang untuk apa di pilih. Sehingga menyebabkan orang-orang yang berasal dari luar agama Islam yang sebagai pengusaha, mampu membayar per suara demi suara. Sehingga masyarakat tersiksa dengan belunggu finansial.
3. PPP selalu dipandang partai baik-baik, dan apabila berubah haluan sedikit dalam perpolitikan, masyarakat langsung menjustifikasi bahwa PPP tidak lagi partai Islam padahal kami melakukan itu dikarena ada sebab dan akibat yang mana tidak diketahui masyarakat. Dan untuk partai lain juga melakukan hal yang sama tapi tidak direspon oleh masyarakat (Muniruddin, 2023).

#### SIMPULAN

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 pada pasal 11 mengatur fungsi partai politik dengan sangat sempurna yang berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakni fungsi partai politik sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari permasalahan yang sudah penulis ulas, jadi disini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan penting sehubungan dengan permasalahan kajian skripsi ini, yaitu sebagai beriku

PPP dalam menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat luas melalui sosialisasi langsung di tempat keramaian masyarakat yakni pengajian-pengajian dari semua bentuk, mendukung setiap aktivitas-aktivitas anak muda dalam memperingati hari besar Islam. Dengan sosialisasi di tengah masyarakat sehingga menimbulkan minat diskusi politik yang berkembang di masyarakat dan disitulah menyampaikan visi misi yang dibawa PPP dan bagaimana peta perpolitikan Nasional.

1. Partai Persatuan Pembangunan memiliki cara tersendiri dalam menciptakan iklim kondusif bagi persatuan bangsa yakni dengan cara tanpa memaksakan kehendak pimpinan itu sendiri, dan membuka kesempatan bagi para anggota-anggota partai untuk menentukan pilihannya sendiri dalam memutuskan pilihan jikalau pilihan itu bersifat eksternal.
2. PPP dalam melakukan penyerapan aspirasi melalui pendekatan kepada masyarakat setiap kali agenda reses, ketika aspirasi ataupun masukan dari masyarakat akan dihimpun, serta menyalurkan aspirasi masyarakat secara berkala.
3. PPP dalam melaksanakan partisipasi politik dikabupaten Labuhanbatu tidak terlalu sulit dikarenakan kesadaran masyarakat sudah menjadi budaya dalam memeriahkan pesta demokrasi dan bahkan jadi obrolan warung kopi bagi masyarakat.
4. PPP labuhanbatu dalam melakukan perekrutan kader partai politik pada saat ini di labuhanbatu ini dengan menggunakan metode loyalitas dan disertai dengan kualitas dalam bekerja untuk partai. Yang mana untuk mewujudkan itu, PPP harus menonjolkan tokoh pemuda yang bisa merangkul kaum muda agar berminat mendalami dan mengikuti proses pembelajaran politik dari partai PPP..

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. ABDUL MU'ID, "PENERAPAN MARKETING POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Marketing Politik Pasangan Independen Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto dalam Pilbup Kabupaten Rembang Tahun 2015)." Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017.
- F. Tatriyansyah, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP REKRUTMEN ANGGOTA PARTAI POLITIK DI KOTA BANDUNG." FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023.
- H. C. Haryanto, T. Rahmania, A. R. Mubarok, A. B. Dopo, H. Fauzi, and E. Fajri, "Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik?," J. Psikol.,

vol. 42, no. 3, pp. 243–258, 2015.

- I. H. Armaoyuda, "Fungsi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- J. Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang." Bayumedia Publishing, cet. Keempat, 2008.
- K. A. J. I. CHANDRA, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG FUNGSI PARTAI POLITIK." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- M. D. Riyan and Y. Suryani, Political quotient: meneladani perilaku politik para Nabi. Madani Prima, 2008.
- M. Fakhri, "Studi Kritis Standarisasi Partai-Partai Islam." Jakarta: Taghyir Press, 2000.
- M. Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.
- W. J. S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, cet." XII.
- Y. I. Mahendra, "Modernisme dan fundamentalisme dalam politik Islam: perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)," (No Title), 1999.